



Evaluasi Keputusan Pemerintah Melalui Pasar Murah dalam Menjaga Stabilisasi Harga Bahan Pokok di Surabaya

Gita Aliyah Indraswari^{1*}, Ria Resti Anjani², Adam Jamal³

^{1,2,3} Universitas Negeri Surabaya; gita.22139@mhs.unesa.ac.id, ria.22135@mhs.unesa.ac.id, adamjamal@unesa.ac.id

Abstrak: Penelitian ini mengevaluasi keputusan yang diambil oleh pemerintah Kota Surabaya dalam mengimplementasikan program pasar murah dengan tujuan menjaga stabilitas harga bahan pokok di wilayah kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan enam indikator evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan, penelitian ini menganalisis sejauh mana program pasar murah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif, dengan pendekatan gabungan dari studi lapangan dan studi pustaka. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa program pasar murah dinilai efektif dalam mencapai tujuan menjaga stabilitas harga bahan pokok, efisien dalam alokasi biaya, memadai dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, merata dalam penyebaran titik lokasi, responsif terhadap kebutuhan dan tanggapan masyarakat serta ketepatan dalam sasaran yang dituju dan waktu pelaksanaannya, sehingga hal tersebut dapat mengurangi tekanan ekonomi masyarakat. Selain itu, saran yang dapat diajukan adalah melanjutkan program secara berkala, meningkatkan koordinasi dengan produsen dan distributor, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pasar murah.

Kata kunci: Pengambilan Keputusan, Evaluasi, Pasar Murah

DOI:

<https://doi.org/10.47134/par.v1i2.2420>

*Correspondensi: Gita Aliyah Indraswari

Email: gita.22139@mhs.unesa.ac.id

Received: 07-12-2023

Accepted: 13-01-2024

Published: 25-02-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This research evaluates the decisions taken by the Surabaya City government in implementing the cheap market program with the aim of maintaining the stability of staple food prices in the Surabaya city area. This research uses six indicators of policy evaluation proposed by William N. Dunn, namely effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness and accuracy, this research analyzes the extent to which the cheap market program has succeeded in achieving its stated objectives. The research method used descriptive qualitative, with a combined approach of field studies and literature studies. The evaluation results show that the cheap market program is considered effective in achieving the objectives of maintaining the stability of staple food prices, efficient in cost allocation, adequate in meeting the needs of the community, equitable in the distribution of location points, responsive to the needs and responses of the community as well as accuracy in the intended target and time of implementation, so that it can reduce the economic pressure of the community. In addition, suggestions that can be made are to continue the program periodically, improve coordination with producers and distributors, and involve community participation in the implementation of the cheap market program.

Keywords: Decision Making, Evaluation, Cheap Market

Pendahuluan

Stabilitas harga bahan pokok merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan laju inflasi. Fluktuasi harga yang terlalu tinggi dapat mengganggu keseimbangan ekonomi dan menurunkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah (Syafaruddin, 2024). Oleh

karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam menjaga kestabilan harga bahan pokok. Hal tersebut sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam UU Pangan Tahun 2012 No. 18 pasal 55 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, pertama: Pemerintah berkewajiban melakukan stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok di tingkat produsen dan konsumen. Kedua: Stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi pendapatan dan daya beli Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan mikro dan kecil, serta menjaga keterjangkauan konsumen terhadap Pangan Pokok. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga sudah dijelaskan bahwasannya, tugas pemerintah daerah meliputi menjamin ketersediaan dan stabilitas harga pangan serta mencapai target konsumsi pangan perkapita atau pertahun yang sesuai dengan standar kecukupan gizi (Asra & M., 2023). Sehingga pemerintah kota Surabaya mengambil keputusan melalui program pasar murah untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok di kalangan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Walikota No.51 tahun 2023 tentang Perdagangan dan Perindustrian di Bidang Pasar Rakyat menjelaskan bahwa Pasar Murah adalah aktivitas kegiatan berbasis perdagangan komoditi pangan dan bahan pokok berbentuk penjualan langsung kepada masyarakat dan pedagang pasar, yang dilakukan oleh Dinas bekerjasama dengan produsen/distributor kebutuhan bahan pokok dengan harga dibawah harga pasar. Program pasar murah di Surabaya mulai dijalankan karena adanya kenaikan harga yang signifikan dan dengan adanya pasar murah diharapkan mampu membantu masyarakat membeli bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau (Surabaya, 2023). Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada pengambilan keputusan yang tepat dan optimal dari pihak-pihak terkait. Pasar murah adalah inisiatif yang dirancang sebagai bagian integral dari strategi stabilisasi harga pangan yang diperkenalkan oleh pemerintah di Indonesia. Dalam implementasinya, pemerintah menugaskan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) untuk menjadi salah satu pelaksana utama program tersebut. Dengan demikian, pasar murah berfungsi sebagai mekanisme yang diperkuat untuk menjaga ketersediaan dan aksesibilitas harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat.

Pasar murah secara esensial dianggap sebagai ekstensi langsung dari operasi pasar yang bertujuan untuk memastikan distribusi yang efektif dan efisien dari produk-produk pangan ke pasar-pasar lokal, meminimalkan fluktuasi harga yang tidak stabil serta meningkatkan daya beli dan kesejahteraan secara keseluruhan bagi penduduk. Tujuan pokok dari pelaksanaan pasar murah adalah untuk menekan permintaan terhadap pasar dengan harapan bahwa penurunan permintaan tersebut akan mengakibatkan penurunan harga di pasar secara keseluruhan, yakni dengan mengurangi intensitas permintaan, diharapkan pasar dapat mengendalikan harga-harga dengan lebih efektif (Suk, 2021). Pemerintah Kota Surabaya menyelenggarakan program pasar murah di Surabaya sebagai upaya untuk menekan inflasi dengan menstabilkan harga pangan dengan menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok selama bulan ramadhan dan hingga akhir tahun. Inisiatif tersebut dijalankan dengan tujuan utama untuk mengurangi tekanan ekonomi masyarakat, seperti permasalahan (Giannetti, 2021). Pertama, kenaikan harga pokok yang menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat Surabaya,

khususnya pada periode tertentu seperti musim panas atau saat terjadi peningkatan permintaan.

Masalah ini dapat menimbulkan beban bagi masyarakat dengan pendapatan yang terbatas dan menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kedua, ketimpangan Ekonomi, pada ketimpangan ekonomi antara kelompok masyarakat juga menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan pemerintah untuk menyelenggarakan program pasar murah. Dengan adanya kesenjangan pendapatan yang besar, banyak masyarakat kurang mampu di Surabaya kesulitan untuk membeli barang-barang kebutuhan pokok dengan harga pasar reguler. Ketiga, dampak pandemi covid-19 yang mana pasca terjadinya pandemi covid-19 telah memberikan dampak serius terhadap perekonomian global, termasuk di Surabaya karena banyak orang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan akibat pandemi ini, sehingga menyebabkan semakin banyak masyarakat yang memerlukan bantuan dalam memenuhi kebutuhan pokok. Keempat, peningkatan inflasi yang mana inflasi yang terjadi di Surabaya juga menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan pemerintah untuk mengadakan program pasar murah. Kenaikan yang memiliki dampak langsung dan melebar atau luas terhadap peningkatan harga lainnya dapat diidentifikasi sebagai inflasi (Sari et al., 2021). Karena inflasi yang tinggi dapat membuat harga barang semakin mahal dan sulit dijangkau oleh sebagian besar masyarakat, terutama mereka yang berada di golongan ekonomi lemah.

Program pasar murah ini juga bertujuan untuk memastikan ketersediaan bahan-bahan pokok tetap terjaga, sehingga masyarakat tidak perlu merasa khawatir lagi. Program ini tidak hanya dijalankan selama bulan Ramadhan, tetapi juga akan dipertimbangkan untuk evaluasi dan dapat dilanjutkan hingga akhir tahun. Selain itu, pemerintah kota juga bekerja sama dengan kepolisian untuk mencegah penimbunan bahan pokok, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri (Elfenbein, 2019). Program pasar murah ini menawarkan berbagai jenis bahan pokok esensial, termasuk beras, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, gula dan daging. Pengambilan keputusan yang optimal dalam menjalankan program pasar murah melibatkan berbagai faktor dan pertimbangan, seperti penentuan lokasi yang strategis, manajemen persediaan yang efisien, koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat serta keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan. Pemerintah kota Surabaya telah mengambil langkah yang tepat, dengan adanya program pasar murah ini dapat membantu masyarakat kota Surabaya mendapatkan bahan pangan pokok dengan harga yang lebih murah. Untuk mendukung keberhasilan program ini berlangsung diperlukan evaluasi yang mendalam terkait pelaksanaan program pasar murah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti akan melakukan evaluasi berdasarkan 6 kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn (2003) yaitu indikator efektivitas, yaitu untuk mengukur apakah program ini telah berjalan efektif dalam mengatasi masalah yang terjadi (Cabrales, 2020). Kedua indikator efisiensi, yaitu indikator untuk mengukur apakah program pasar murah ini mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan bahan pokok dengan harga murah. Ketiga indikator kecukupan, untuk melihat sejauh mana program tersebut mampu memberikan solusi yang memadai terhadap permasalahan yang dihadapi. Keempat indikator pemerataan, untuk melihat sejauh mana program pasar murah dapat memberikan manfaat secara adil kepada semua masyarakat tanpa ada kesenjangan. Kelima indikator responsivitas, untuk mengukur

sejauh mana program pasar murah tersebut dapat merespon perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial, ekonomi, maupun politik (Burigana, 2023). Keenam indikator ketepatan, yang mana indikator ini dapat mengukur sejauh mana program pasar murah ini dapat mencapai tujuan yang ditetapkan dengan melibatkan pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Keputusan Pemerintah Melalui Program Pasar Murah Dalam Menjaga Stabilisasi Harga Bahan Pokok di Surabaya.”

Metode

Metode penelitian merupakan proses yang digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai kajian yang akan diteliti. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini gabungan dari studi lapangan (*field study*) dan studi pustaka (*literature review*) dalam Darmalaksana (2020:3). Penelitian ini memfokuskan pada evaluasi kebijakan melalui program pasar murah dalam menjaga stabilisasi harga bahan pokok di Kota Surabaya yang di buat dan diputuskan oleh pemerintah kota Surabaya. Sehingga pada keputusan pemerintah terkait program pasar murah agar dapat diketahui tingkat efektivitas atau tidaknya dengan mengevaluasi suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, karena evaluasi tidak hanya memberikan analisis tentang tingkat penyelesaian masalah, namun juga memberikan wawasan dan kritik terhadap prinsip-prinsip yang mendasari kebijakan, yang pada akhirnya mendukung proses penyesuaian dan pengembangan ulang masalah (Dunn, 2000) dalam (Adeliana et al., 2019). Sehingga pada penelitian ini penulis mengevaluasi keputusan pemerintah terkait pasar murah melalui evaluasi program dengan menggunakan enam indikator menurut William N. Dunn, yakni:

1. Efektivitas (*Effectiveness*) Efektivitas biasanya berhubungan dengan hasil yang diharapkan dari penyelenggaraan program pasar murah. Oleh karena itu, mengukur efektivitas dapat dilakukan dengan melihat dan menilai seberapa jauh suatu tujuan telah dicapai.
2. Efisiensi (*Efficiency*) Bisa dikatakan bahwa efisiensi biasanya diukur dengan perhitungan sumber daya yang digunakan untuk mencapai efektivitas program pasar murah karena efisiensi adalah upaya yang dibutuhkan dan juga diperlukan untuk mencapai tingkat efektivitas tertentu.
3. Kecukupan (*Adequacy*) Kecukupan adalah tingkat efektivitas untuk memenuhi kebutuhan. Ini juga dapat berarti seberapa jauh efektivitas dapat memenuhi kebutuhan nilai.
4. Pemerataan (*Equity*) Rasionalitas legal dan sosial biasanya berhubungan dengan pemerataan, yang juga biasanya menghasilkan pemerataan akibat dan upaya dari kelompok yang terlibat dalam masyarakat.
5. Responsivitas (*Responsiveness*) Responsivitas didefinisikan sebagai seberapa jauh kebijakan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan memecahkan masalah masyarakat.
6. Ketepatan (*Appropriateness*) Ketepatan dalam teori evaluasi William Dunn ini mengacu pada nilai tujuan program dan asumsi yang melandasi tujuan kebijakan.

Peneliti menggunakan keenam indikator di atas untuk menjelaskan dan menggambarkan sejauh mana program pasar murah dalam menjaga stabilisasi harga bahan pokok di Surabaya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan studi kepustakaan. Teknik analisis data penelitian ini didasarkan pada karya Miles dan Huberman, yang mengusulkan pendekatan tiga cabang untuk memahami data: Reduksi data, Penyajian data dan Penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Efektivitas

Efektivitas yang dimaksudkan adalah aspek yang sangat krusial untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Jika suatu kebijakan telah berjalan dengan efektif, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan tersebut telah mencapai keberhasilan yang diharapkan (Setiawan et al., 2017). Pada pengimplementasian program pasar murah di Surabaya rasio efektivitas dimanfaatkan sebagai instrumen evaluasi untuk menilai kapasitas pemerintah daerah dalam mewujudkan rencana program yang telah dicanangkan, dengan membandingkan hasil yang dicapai terhadap sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya (Adiyadnya & Setiawina, 2015). Sehingga keputusan pemerintah dengan melaksanakan program pasar murah telah dianggap berjalan dengan efektif di beberapa titik lokasi yang ada di Surabaya. Hal tersebut dibuktikan dengan tingkat tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dalam program pasar murah, yaitu dalam menjaga stabilisasi harga bahan pokok di Surabaya, yakni dengan dibuktikan oleh wali kota Surabaya Eri Cahyadi yang mengajukan permintaan kepada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan (Dinkopdag) untuk dapat melaksanakan Pasar Murah sampai akhir tahun 2024. Dimana, seperti yang telah dijelaskan oleh kepala Dinkopdag yaitu Dewi Soeriyawati menyatakan bahwa operasional pasar murah merupakan hasil dari kerjasama antara pemerintah kota dengan berbagai pihak, termasuk distributor, produsen dan kelompok tani.

Inisiatif ini juga merupakan bagian dari strategi pemerintah kota Surabaya dalam mengatasi masalah inflasi, dengan fokus khusus pada pengendalian dampak inflasi terhadap masyarakat Surabaya. Ada berbagai jenis bahan pokok yang tersedia di Pasar Murah. Salah satu produk yang ditawarkan adalah Beras Premium, yang dijual dalam volume 204.500 Kilogram dengan tarif Rp67.500 per sak, dan disajikan dalam kemasan 5 Kg. Selain itu, Beras medium juga tersedia dalam jumlah 50.000 Kilogram, dengan tarif Rp50.000 per sak, dan juga disajikan dalam kemasan 5 Kg. Selanjutnya, pasar murah menawarkan gula sebanyak 17.600 Kilogram, dengan tarif Rp16.000 per Kg serta telur ayam sebanyak 10.000 Kg atau setara dengan 16.000 pack, dengan tarif Rp19.000 per pack. Pasar murah juga menyediakan bawang merah dalam jumlah 4,5 ton, yang setara dengan 9.900 bungkus, dengan tarif Rp10.000 per kilogram, apalagi makanan beku dan daging ayam juga tersedia, yang didistribusikan secara langsung oleh distributor di 47 titik lokasi pasar murah (BPKAD SURABAYA, 2024). Selain itu, tingkat efektivitas program pasar murah juga dapat dilihat dari seberapa besar dampak program pasar murah dalam menekan harga bahan pokok di Surabaya, seperti adanya gerakan pangan murah (GPM) yang dampaknya sangat

besar dalam menekan harga bahan pokok (Mertikopoulos, 2024). Kegiatan GPM ini digelar untuk memperkuat pelaksanaan program operasi pasar yang dilaksanakan dua kali dalam satu pekan oleh pemkot setempat di kantor kecamatan, kelurahan hingga balai RW.

Pemerintah kota Surabaya meminta agar masyarakat tidak perlu khawatir soal ketersediaan bahan pokok menjelang bulan Ramadhan dikarenakan biasanya di GPM, akan menyediakan sekitar 8-10 ton beras, termasuk beras SPHP dan beras premium. Berdasarkan hal tersebut, masyarakat Surabaya dan sekitarnya merasakan bahwa keputusan yang diambil oleh pemerintah kota Surabaya terkait penyelenggaraan program pasar murah dianggap sudah efektif dalam mengurangi tekanan ekonomi masyarakat. Apalagi, jika diwaktu menjelang bulan ramadhan dan hari raya yang dimana harga-harga kebutuhan pokok biasanya melonjak drastis, sehingga banyak warga setempat yang mengeluhkan hal itu, terutama pada warga yang ekonominya rendah yang pastinya akan sangat merasa dirugikan (O'Brien, 2023). Namun, untung saja hal tersebut sudah ditangani oleh pemerintah kota Surabaya dengan tetap menjaga stabilisasi harga bahan pokok melalui pasar murah dengan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Surabaya yang berkesinambungan. Dimana, pada kondisi harga yang stabil memungkinkan para pelaku usaha, baik produsen maupun pedagang, untuk bisa melakukan perencanaan investasi dan kegiatan produksi secara lebih baik. Hal ini, pada akhirnya dapat meningkatkan aktivitas ekonomi di sektor-sektor terkait serta juga dapat menciptakan peluang lapangan kerja baru bagi masyarakat (Ap & Hertati, 2023). Dengan keputusannya untuk menggelar pasar murah yang berada pada 200-an titik lokasi di kota Surabaya, yang mana pada 1 titik bisa mengcover beberapa RW supaya lebih mudah dijangkau oleh masyarakat sekitar.

Efisiensi

Menurut Susilo dalam (Serda et al., 2022), efisiensi merujuk pada kondisi atau keadaan di mana suatu tugas atau pekerjaan dapat diselesaikan dengan tepat dan menggunakan sepenuhnya kemampuan yang dimiliki. Indikator yang digunakan peneliti untuk mengukur efisiensi dari implementasi program pasar murah di Surabaya adalah alokasi biaya yang digunakan sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan evaluasi dari aspek efisiensi untuk implementasi program pasar murah di Surabaya dalam menjaga stabilisasi harga dapat dikatakan bahwa program pasar murah dilaksanakan dengan menggunakan alokasi dana yang sesuai dengan kebutuhan (Saraiva, 2023). Yakni dibuktikan dengan adanya langkah-langkah, seperti:

1. Monitoring harga komoditas pangan di pasar setiap hari.
2. Jalinan kerjasama dengan daerah penghasil bahan pangan.
3. Membuat Kios TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) untuk menjual beras sesuai HET (Harga Eceran Tertinggi) serta melakukan operasi pasar.
4. Melakukan Gerakan Pasar Murah dan Gerakan Tanam Bersama untuk tanaman cepat panen.
5. Mengadakan kegiatan Gerakan Pangan Murah setiap sebulan sekali berlokasi di daerah padat penduduk yang menjual.

6. Berkoordinasi dengan distributor atau produsen bahan pokok agar tidak melakukan penimbunan.
7. Meminta mereka agar menjual bahan pokok dengan harga normal atau sesuai ketentuan.
8. Melakukan rapat koordinasi setiap dua kali dalam seminggu untuk mengevaluasi efektivitas langkah-langkah yang telah diambil (Jatim Newsroom, 2024).

Pemkot Surabaya juga berkoordinasi dengan distributor atau produsen bahan pokok agar tidak melakukan penimbunan dan meminta mereka untuk menjual bahan pokok dengan harga yang normal atau sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tindakan ini dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya untuk memenuhi kebutuhan pokok penduduk Surabaya dan memastikan stabilitas pasokan serta harga pangan di wilayah setempat. Dikarenakan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat, pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dan strategis. Yang mana tanggung jawab pemerintah tidak hanya terbatas pada menjaga keamanan semata, namun juga mencakup penciptaan kondisi masyarakat yang adil dan sejahtera (Fox, 2022). Untuk itu, pencapaian tujuan tersebut mustahil dapat diwujudkan apabila tanpa adanya keterlibatan aktif pemerintah dalam membela dan melindungi kelompok masyarakat yang lemah serta memberikan bantuan kepada masyarakat yang menghadapi permasalahan terkait aspek ekonomi. Dengan demikian, peran pemerintah menjadi sangat krusial dalam upaya mewujudkan keadilan sosial dan kemakmuran bagi seluruh rakyatnya (TOHARI, 2018). Dari hal tersebut, dapat dianggap bahwa keputusan pemkot terkait penyelenggaraan program pasar murah di Surabaya dalam penempatan alokasi biayanya sudah sesuai antara anggaran yang diberikan dengan anggaran yang direalisasikan dan target kinerja yang ditetapkan. Sehingga pengambilan keputusan yang dibuat pemerintah kota Surabaya untuk menggelar pasar murah yang tujuannya menstabilkan harga bahan pokok berhasil menangani inflasi, khususnya dari sisi pengendalian dampak inflasi kepada masyarakat Surabaya.

Kecukupan

Kriteria kecukupan menekankan pada kekuatan hubungan antara pilihan kebijakan dengan hasil yang diinginkan (Mustari, 2015). Kecukupan dalam evaluasi ini untuk mengetahui seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan tersebut dapat memecahkan permasalahan yang terjadi. Dalam mengevaluasi kebijakan juga perlu melihat sejauh mana hasil yang diinginkan dalam menyelesaikan permasalahan publik, program yang dibuat harus mampu untuk membantu memecahkan masalah publik, supaya kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik dan tidak ada lagi hambatan, penyelenggara kebijakan juga harus tahu apa yang dihadapi masyarakat agar tidak salah dalam memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah (Nawaz, 2022). Dalam konteks program pasar murah di Surabaya, indikator kecukupan ini dapat digunakan untuk menilai apakah program tersebut mampu memuaskan kebutuhan masyarakat dalam menghadapi kenaikan harga bahan pokok dan inflasi. Dengan dilihat dari: Apakah jenis dan jumlah bahan pokok yang dijual di pasar murah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Surabaya?

Dari pertanyaan tersebut dapat dijawab, iya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jawaban tersebut dapat dibuktikan dengan data yang peneliti dapatkan dari pernyataan pemkot Surabaya pada tahun 2023 yang menegaskan bahwa indeks ketersediaan bahan pokok utama, yaitu beras sangat memadai untuk seluruh penduduk kota Surabaya.

Indeks kecukupan pangan bahan pokok beras kota Surabaya pada bulan Agustus 2023 mencapai 1,31 yang menunjukkan bahwa jumlah beras yang tersedia di pasar, termasuk di agen, toko, pedagang eceran dan toko kelontong melebihi jumlah kebutuhan seluruh penduduk kota Surabaya. Yang jika digambarkan kebutuhan beras untuk seluruh penduduk kota Surabaya adalah 100 ton, maka jumlah beras yang tersedia di pasar mencapai 131 ton. Oleh karena itu, beras sebagai bahan pokok utama dianggap sangat mencukupi untuk seluruh kebutuhan warga kota Surabaya (Pewartanya Pemkot Surabaya, 2023). Sekretaris Daerah Kota Surabaya, Ikhsan yang juga menjabat sebagai ketua tim pengendali inflasi kota Surabaya, menegaskan bahwa pemkot Surabaya melakukan pengendalian harga dengan menyediakan informasi mengenai perkembangan harga dari pemantauan harga komoditas di berbagai pasar melalui televisi yang dipasang di pasar-pasar tersebut, termasuk Pasar Wonokromo, Tambahrejo, Pucang Anom, Genteng Baru dan Pabean.

Dari informasi tersebut warga bisa mengetahui harga wajar yang ada di hari itu sehingga para pedagang tergerak untuk tidak menjual dengan harga yang terlalu tinggi. Oleh karenanya, warga tidak perlu khawatir, karena ketersediaan sangat cukup memenuhi kebutuhan masyarakat dan harga diharapkan tidak akan naik tinggi dengan digelontorkannya beras ke para pedagang, yang dimana harga tersebut telah diketahui oleh semua pedagang yang dipasok. Upaya ini dilakukan guna memberikan solusi terhadap permasalahan tingginya biaya hidup yang dihadapi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang bergantung pada beras sebagai sumber pangan utama. Melalui program ini, harga beras dipangkas sehingga masyarakat dapat mengalokasikan sumber daya finansialnya secara lebih dari cukup dalam pemenuhan kebutuhan pangan sehari-hari. Dengan demikian, beban pengeluaran rumah tangga dapat diringankan, khususnya untuk mencukupi konsumsi bahan makanan pokok tersebut (Putra & A., 2023). Berdasarkan hal tersebut, pengambilan keputusan pemerintah melalui program pasar murah merupakan keputusan yang tepat, karena program pasar murah telah memenuhi kriteria kecukupan dalam menangani permasalahan publik di Surabaya akibat kenaikan harga bahan pokok dan peningkatan inflasi.

Pemerataan

Menurut teori William Dunn, pemerataan merujuk pada pola pikir dalam bertindak secara legal yang berhubungan dengan pemasaran akibat usaha antar kelompok yang tidak sesuai dengan masyarakat. Dalam hal ini pemerataan erat kaitannya dengan bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan. Di mana kebijakan tersebut harus diterapkan secara adil untuk masyarakat. Adapun pengertian kesamaan menurut Budi Winarno, yaitu : "Pemerataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Prinsip pemerataan (*equity*) sangat

terkait dengan prinsip rasionalitas yang bersifat legal dan sosial, yang menunjukkan distribusi hasil dan upaya antara berbagai kelompok dalam masyarakat.” (Winarno, 2002).

Kadisperdagin Surabaya Widodo Suryantoro mengatakan, sasaran utama pasar murah adalah wilayah padat penduduk dengan rata-rata tingkat ekonomi menengah ke bawah. Berdasarkan pernyataan tersebut peneliti menilai indikator pemerataan tersebut dari sisi penyebaran titik pelaksanaan program pasar murah. Pemerintah Kota Surabaya berencana akan menggelar program pasar murah ini di 200-an lokasi yang tersebar di seluruh wilayah kota Surabaya mulai dari Surabaya bagian Timur, Barat, Selatan hingga Utara. Selain pasar murah Ramadan, Pemerintah Kota Surabaya juga menyediakan bahan pokok dengan harga yang terjangkau di Kios TPID. Saat ini, Kios TPID telah ditempatkan di 40 pasar yang dikelola oleh PD Pasar Surya, Dinkopdag serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). Pada Selasa, 12 Maret 2024 pemerintah kota sudah berhasil merealisasikan program tersebut di 244 titik yang tersebar di Surabaya. Wali Kota, Eri Cahyadi mengatakan “Oleh karena itu, kami memutuskan untuk menyelenggarakan pasar murah di 200-an titik lokasi. Di mana setiap lokasi tersebut mencakup beberapa Rukun Warga (RW), ini dilakukan dengan tujuan untuk memperdekatkan diri kepada masyarakat”, jelasnya (Haezer, 2024). Berdasarkan dari data tersebut, indikator pemerataan dalam program ini dapat dikatakan berhasil dapat dilihat dari penyebaran wilayah yang merata.

Responsivitas

Menurut William N. Dunn, kriteria yang diperlukan dalam proses evaluasi kebijakan publik adalah Responsivitas (*responsiveness*), yang merujuk pada sejauh mana kebijakan tersebut dapat memenuhi kebutuhan, preferensi atau nilai-nilai yang diinginkan oleh berbagai kelompok dalam masyarakat tertentu” (Dunn, 2003). Adapun pengertian responsivitas menurut Budi Winarno, yaitu: “Responsivitas dalam konteks kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai tanggapan terhadap suatu tindakan, yang berarti sejauh mana kebijakan tersebut dapat menjawab kebutuhan, preferensi, atau nilai-nilai yang diinginkan oleh berbagai kelompok masyarakat. Keberhasilan kebijakan dapat diukur melalui reaksi masyarakat yang merespons pelaksanaan kebijakan setelah mempertimbangkan dampak yang diharapkan, serta reaksi masyarakat setelah dampak kebijakan mulai terlihat, baik dalam bentuk dukungan maupun penolakan” (Winarno, 2002).

Dari penjelasan tersebut dikatakan pengambilan keputusan pemerintah terkait keberhasilan suatu program dapat dilihat melalui respon atau tanggapan masyarakat mengenai adanya program pasar murah. Dimana, adanya program pasar murah ini masyarakat menunjukkan antusiasnya, dapat dibuktikan berdasarkan pernyataan dari Umar Agung selaku koordinator Dinkopdag dalam acara Pasar Murah menyebut, selama seminggu ini pihaknya sudah menjual 50 sak beras medium yang dibanderol Rp51.500, serta 60 sak beras premium yang dipatok seharga Rp67.500. Antusias masyarakat untuk membeli bahan pokok tersebut karena pemerintah menjual barang dengan harga yang lebih murah dari harga sebelumnya yaitu mencapai Rp74.500. Harga yang ditawarkan

pemerintah jelas memiliki selisih yang jauh lebih murah yaitu Rp7000 dibandingkan dengan harga yang beredar sebelumnya. Dengan selisih harga yang cukup jauh, masyarakat lebih antusias untuk membeli bahan pokok di pasar murah. Antusias masyarakat juga dapat dilihat melalui stok barang yang dibawa Dinkopdag selalu hampir habis setiap harinya. "Karena memang harga beras dan beberapa bahan pokok di pasar lainnya cukup tinggi, jadi pasti stok yang dibawa ke pasar murah selalu hampir habis," ujarnya. Sehingga, dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa program pasar murah ini berhasil menjaga stabilisasi karena lonjakan harga bahan pokok di Surabaya. Karena dalam upaya merespons lonjakan harga yang berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat, tindakan stabilisasi dipandang sebagai langkah yang diambil setelah dilakukannya proses pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan harga di pasar (Maisyarah et al., 2014). Dimana, stabilisasi sendiri tujuannya adalah untuk mengendalikan fluktuasi harga yang signifikan, supaya kebutuhan dan daya beli masyarakat Surabaya dapat terjaga (Fadhulloh, 2018).

Ketepatan

Kriteria yang diperlukan dalam proses evaluasi kebijakan publik menurut William N. Dunn. Secara dekat berhubungan dengan rasionalitas substantif yang merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan kebijakan tersebut. Kriteria yang menilai ketepatan secara dekat sangat terkait dengan aspek rasionalitas dan substansi, karena pertanyaan yang berkaitan dengan ketepatan kebijakan tidak hanya terkait dengan satu kriteria individu saja, tetapi melibatkan dua atau lebih kriteria secara bersamaan (Akibu, n.d.). Inisiatif pelaksanaan program pasar murah merupakan sebuah pengambilan keputusan dan langkah strategis yang tepat sasaran dalam menghadapi situasi inflasi yang tengah melanda saat ini. Kegiatan pasar murah yang diselenggarakan secara serentak ini diyakini mampu menjadi solusi efektif untuk menstabilkan harga komoditas pangan pokok yang kerap mengalami lonjakan saat memasuki bulan Ramadan dan menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah.

Dihadirkannya pasokan bahan pangan berkualitas dengan harga terjangkau, diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya di masa-masa krusial tersebut. Berdasarkan pertimbangan kondisi ketepatan sasaran dan waktu pelaksanaan yang telah disesuaikan, maka program pasar murah ini telah memenuhi kriteria ketepatan atau relevansi yang dibutuhkan. Seperti dalam perencanaan program pasar murah, pemerintah memiliki sasaran langsung terhadap masyarakat yang berdomisili di sekitar area pasar. Sehingga dari hasil secara langsung yang ada di lapangan dapat dibilang bahwa program ini telah mencapai target ketepatan sasaran program yang diinginkan (Reswari & Manggalou, 2023). Serta penyelenggaraan kegiatan ini secara tepat waktu pada saat terjadi peningkatan permintaan barang kebutuhan pokok akibat periode Ramadan dan menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri merupakan sebuah upaya antisipatif yang patut diapresiasi. Dengan demikian, program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam menjaga stabilitas harga serta membantu masyarakat memperoleh

akses terhadap barang-barang kebutuhan sehari-hari dengan harga yang terjangkau di tengah situasi inflasi yang terjadi.

Kesimpulan

Hasil evaluasi yang sudah dilakukan menggunakan enam indikator menurut William N. Dunn, yaitu: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan, dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan pemerintah Kota Surabaya melalui program pasar murah dinilai efektif, efisien, cukup, merata, responsif dan tepat sasaran dalam menjaga stabilisasi harga bahan pokok serta mengurangi tekanan ekonomi masyarakat, terutama pada periode tertentu seperti bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Beberapa poin penting yang dapat dijelaskan antara lain: 1) Program pasar murah berhasil mencapai tujuannya dalam menjaga stabilisasi harga bahan pokok di Surabaya dengan menyediakan berbagai jenis bahan pokok esensial dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat. 2) Alokasi biaya dalam pelaksanaan program pasar murah dilakukan secara efisien dengan melakukan koordinasi yang baik dengan distributor dan produsen, serta melakukan monitoring harga secara rutin. 3) Ketersediaan bahan pokok dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Surabaya, khususnya untuk komoditas beras yang mencapai indeks kecukupan 1,31. 4) Penyebaran titik lokasi pasar murah yang merata di seluruh wilayah Surabaya menunjukkan adanya pemerataan dalam pelaksanaan program ini. 5) Tanggapan dan antusiasme masyarakat yang positif terhadap program pasar murah mencerminkan responsivitas yang baik dari kebijakan ini dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. 6) Program pasar murah dinilai tepat sasaran dan dilaksanakan pada waktu yang tepat, yaitu saat terjadi inflasi dan menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Berdasarkan hasil evaluasi dan simpulan yang telah dipaparkan, penulis memberikan masukan berupa beberapa saran yang dapat dijadikan bahan kajian di masa mendatang yakni, sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Surabaya dapat mempertimbangkan untuk melanjutkan program pasar murah secara berkala, tidak hanya terbatas pada periode tertentu seperti bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri, tetapi juga pada waktu-waktu lain yang diperlukan untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok.
2. Meningkatkan koordinasi dan kemitraan dengan produsen, distributor, dan kelompok tani dalam rangka menjaga ketersediaan dan pasokan bahan pokok yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Surabaya.
3. Melakukan evaluasi dan penyesuaian secara berkala terhadap jenis, jumlah, dan harga bahan pokok yang dijual di pasar murah agar sesuai dengan kebutuhan dan daya beli masyarakat.
4. Mengoptimalkan sosialisasi dan promosi program pasar murah kepada masyarakat agar lebih banyak masyarakat yang dapat memanfaatkan program ini, terutama masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah.
5. Mempertimbangkan untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pasar murah, seperti dengan membentuk kelompok masyarakat yang bertugas membantu pendistribusian bahan pokok atau menjaga ketertiban di lokasi pasar murah.

Daftar Pustaka

- Adeliana, V., Ridlo, M. A., & Rochani, A. (2019). Evaluasi Manajemen Pasar Tradisional Berdasarkan Aspek Pelayanan Prima (Studi Kasus Pasar Tradisional Peterongan Semarang). *Jurnal Planologi*, 14(2), 178. <https://doi.org/10.30659/jpsa.v14i2.3873>
- Adiyadnya, M. S. P., & Setiawina, N. D. (2015). Analisis Tingkat Efektifitas Dan Daya Saing Program Revitalisasi Pasar Tradisional di Pasar Agung Peninjoan Desa Peguyangan Kangin. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 04, 265–281. <https://media.neliti.com/media/publications/44723-ID-analisis-tingkat-efektivitas-dan-daya-saing-program-revitalisasi-pasar-tradision.pdf>
- Akibu, R. S. (n.d.). *Jurnal Evaluasi Kebijakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Di Sma Negeri 1 Ampibabo Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong*.
- Ap, A. F., & Hertati, D. (2023). Gelar Operasi Pasar Jawa Timur Sebagai Upaya Mengatasi Lonjakan Harga Pangan. *Jurnal Media Pengabdian Kepada Masyarakat (MPKM)*, 2(2), 1–10.
- Asra, Y., & M., H. A. (2023). Implementasi Program Sembako Murah Bersubsidi Di Kabupaten Bengkalis. *11th Applied Business and Engineering Conference*, 348.
- BPKAD SURABAYA. (2024). *Stabilkan Harga Dan Jaga Stok Bahan Pokok, Pemkot Surabaya Gelar Pasar Murah Di 244 Titik*. <https://bpkad.surabaya.go.id/berita/stabilkan-harga-dan-jaga-stok-bahan-pokok-pemkot-surabaya-gelar-pasar-murah-di-244-titik>
- Burigana, D. (2023). Cheap Eurochips. Electronics from the technological gap debate to the Common Market (1966-1987). *HISTELCON 2023 - 2023 IEEE History of Electrotechnology Conference, Proceedings*, 68–71. <https://doi.org/10.1109/HISTELCON56357.2023.10365830>
- Cabrales, A. (2020). Can there be a market for cheap-talk information? An experimental investigation. *Games and Economic Behavior*, 121, 368–381. <https://doi.org/10.1016/j.geb.2020.03.002>
- Elfenbein, D. W. (2019). Does cheap talk affect market outcomes? Evidence from eBay. *American Economic Journal: Applied Economics*, 11(4), 305–326. <https://doi.org/10.1257/app.20170086>
- Fadhulloh, Z. H. H. (2018). *Peran Pemerintah Dalam Menjaga Stabilisasi Harga Melalui Operasi Pasar Murni (Opm) Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Dinas Perindag Diy)* (Vol. 2, Issue 1). <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-76887-8%0Ahttp://link.springer.com/10.1007/978-3-319-93594-2%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-409517-5.00007-3%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jff.2015.06.018%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41559-019-0877-3%0Aht>
- Fox, J. (2022). Numeracy and Popular Culture: Cocker's Arithmetick and the Market for Cheap Arithmetical Books, 1678–1787. *Cultural and Social History*, 19(5), 529–545. <https://doi.org/10.1080/14780038.2022.2089078>
- Giannetti, M. (2021). Cheap trade credit and competition in downstream markets. *Journal of Political Economy*, 129(6), 1744–1796. <https://doi.org/10.1086/713731>

- Haezer, E. (2024). *Daftar Lengkap 262 Lokasi Pasar Murah di Kota Surabaya Hari ini, Ada Beras dan Minyak Goreng Murah*. <https://mataraman.tribunnews.com/2024/03/12/daftar-lengkap-262-lokasi-pasar-murah-di-kota-surabaya-hari-ini-ada-beras-dan-minyak-goreng-murah?page=4>
- Jatim Newsroom. (2024). *Kerjasama Antar Daerah dan Pasar Murah Strategi Surabaya Kendalikan Harga Bahan Pokok*. <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/kerjasama-antar-daerah-dan-pasar-murah-strategi-surabaya-kendalikan-harga-bahan-pokok>
- Mertikopoulos, P. (2024). Quick or cheap? Breaking points in dynamic markets. *Journal of Mathematical Economics*, 112. <https://doi.org/10.1016/j.jmateco.2024.102987>
- Nawaz, A. (2022). Production and market comparison of urokinase and streptokinase as effective and cheap fibrinolytic agents for treatment of cardiovascular diseases. *Acta Scientiarum - Technology*, 44. <https://doi.org/10.4025/actascitechnol.v44i1.56088>
- O'Brien, D. P. (2023). Cheap Exclusion in Markets with Multiple Complements. *International Journal of Industrial Organization*, 89. <https://doi.org/10.1016/j.ijindorg.2023.102982>
- Putra, M. Y. A. D., & A., R. (2023). Distribusi Beras Murah Untuk Masyarakat Oleh PT. Jatim Grha Utama Dalam Gelaran Operasi Pasar Lumbung Pangan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3).
- Reswari, R. A., & Manggalou, S. (2023). Efektivitas Program Operasi Pasar Penutupan Satu Abad NU di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. *Journal Economic and Business Management* ..., 5(3), 225–230. <https://mandycmm.org/index.php/eabmij/article/view/360%0Ahttps://mandycmm.org/index.php/eabmij/article/download/360/534>
- Saraiva, V. C. D. S. (2023). The cheapest meat on the market is black meat: notes on racism and obstetric violence against Black women. *Ciencia e Saude Coletiva*, 28(9), 2511–2517. <https://doi.org/10.1590/1413-81232023289.05182023EN>
- Sari, V. M., Utoyo, B., & Tresiana, N. (2021). Evaluasi Pengendalian Inflasi Di Kota Bandar Lampung Tahun 2018. *Jurnal Birokrasi, Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 3, 114.
- Serda, M., Becker, F. G., Cleary, M., Team, R. M., Holtermann, H., The, D., Agenda, N., Science, P., Sk, S. K., Hinnebusch, R., Hinnebusch A, R., Rabinovich, I., Olmert, Y., Uld, D. Q. G. L. Q., Ri, W. K. H. U., Lq, V., Frxqwu, W. K. H., Zklfk, E., Edvhg, L. V, &)2022. فاطمی ح. Evaluasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Blora Tahun 2021. *Journal of Politic and Government Studies*, 11(2), 385–404. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/33574>
- Setiawan, N. P., Hernawan, D., & Salbiah, E. (2017). Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bogor No 12 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Pada Sekolah Menengah Atas Negeri Di Kota Bogor). *Jurnal Governansi*, 3(1), 18. <https://doi.org/10.30997/jgs.v3i1.809>
- Suk, M. (2021). The moderating role of subjective norms and self-congruence in customer purchase intentions in the LCC market: Do not tell me I am cheap. *Research in Transportation Business and Management*, 41. <https://doi.org/10.1016/j.rtbm.2020.100595>
- Surabaya, P. P. (2023). *Ketersediaan Bahan Pokok Di Surabaya Aman*. <https://surabaya.go.id/id/berita/75848/ketersediaan-bahan-pokok-di-sur>

-
- Syafaruddin, M. (2024). *Antusiasme Tinggi Masyarakat dalam Pasar Murah di Bank Jatim QRIS Ramadan Vaganza*. <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2024/antusiasme-tinggi-masyarakat-dalam-pasar-murah-di-bank-jatim-qrisk-ramadan-vaganza/>
- TOHARI, A. (2018). *Analisis Masalah Terhadap Intervensi Pemerintah Daerah Ponorogo Dalam Stabilisasi Kebutuhan Pokok Melalui Operasi Pasar* (Vol. 2, Issue 1). <https://etheses.iainponorogo.ac.id/5050/1/Amin>